

ABSTRACT

Nama : Asri Pertiwi
Program Studi : Akuntansi
Judul : “Analysis of Contributions Receipts Tax on Land and Building (PBB) Against Local Revenue in Sukoharjo 2012-2014”

The authority PBB collection of the Central Government to the District / City Government is in accordance with the mandate of Act No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies (PDRD). This final project aims to determine the level of acceptance of the PBB and the PBB contribution to local revenues of Sukoharjo in 2012-2014. This research was conducted with descriptive quantitative methodology. The type of data that is used through the process of observation, documentation and interview. The level of tax revenue in Sukoharjo the Year 2012-2014 has increased. Acceptance of the 2012 to the 2013 has increased Rp 1,324,169,703.00 approximately 5.28%. Acceptance of the 2013 to the 2014 has increased Rp 3,131,383,041.00 about 11.87%. the contribution of pbb to the local revenues from the tax sector showed medium criteria. the percentage contribution of pbb to local revenues from taxes on the sector in 2012 amounted to 29.24%, in 2013 amounted to 25.74%, and in 2014 amounted to 25.43% with an average contribution of 26.80%. The contribution of pbb to the local revenues showed a very less number . the percentage contribution of pbb at the local revenues in 2012 amounted to only 1.38%, in the year 2013 of 1.93%, and in 2014 only amounted to 1.88% with an average contribution of 1.73%. The author suggests to the tax revenue officers to improve their performance and services along with socialization of pbb hopefully the acceptance of the pbb and the contribution of it towards the local revenues can be maximized in accordance with the goals.

Keywords : PBB, contribution, PAD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

APBN menurut uu nomor 17 tahun 2003 pasal 1 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan APBD dikelola oleh pemerintah daerah. APBD menurut uu nomor 17 tahun 2003 pasal 1 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) struktur penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pajak asli daerah yang sah (UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 5). Pajak merupakan sumber utama penerimaan asli daerah. Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang artinya dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Penerimaan pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari